

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

5.1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa dana TP merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Dana TP Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

5.1.2. Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2012 adalah sebesar Rp234.382.816.000,00 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp68.827.192.000,00 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp6.490.154.000,00 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.871.995.000,00, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp28.490.000,00, Kementerian Pertanian sebesar Rp47.521.387.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Rp1.500.000.000,00 dan RSUD Raden Mattaher Rp60.000.000.000,00 secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP TA. 2012 yang dikelola SKPD/ SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp219.104.459.200,00 atau 93,48%.

Tabel 5.1. Dana TP Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2012

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana TP	Total Dana (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)
1.	Disosnakestrans	Kemenakertras	4.284.164	2.645.112,6	61,74
		Kemensos	2.205.990	1.759.556,4	79,76
2.	Dinas Pertanian TP	Kementan	47.521.387	45.143.608	95
3.	Dinas Perkebunan	Kementan	16.213.618	15.631.250	96,41
4.	Disnak dan Keswan	Kementan	26.929.980	24.361.022	90,46
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mendagri	1.500.000	1.446.454.	96,43
6.	Dinas PU	Kemen PU	68.827.192	67.400.548	97,93
7.	Dinas Kelautan Perikanan	Kemen KP	6.871.995	5.763.327	83,87
8.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Kemenbudpar	28.490	-	0
9.	RSUD Raden Mattaher	Kemenkes	60.000.000	56.400.035,2	94
J u m l a h			234.382.816	219.104.459,2	93,48

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2013 (data diolah)

5.1.3. Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan TP terdiri dari 9 SKPD yaitu; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan RSUD Raden Mattaher.

5.1.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dilaksanakan untuk empat program yaitu:

1). Program pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan dua kegiatan yaitu:

- a) Kegiatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan dana sebesar Rp600.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan pelestarian bangunan bersejarah. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp586.776.000,00 atau 97,80 %.
- b) Kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan dana sebesar Rp2.084.480.000,00

yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi, berupa pembangunan rumah sederhana bagi warga KAT, bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras, sertifikasi lahan, pembangunan sarana air bersih dan MCK. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.023.737.000,00 atau 97,09%.

2). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan dana sebesar Rp1.599.684.000,00 yang digunakan untuk operasional tugas pembantuan dan terbantunya para korban bencana di Provinsi Jambi. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 34.600.000,00 atau 2,16%.

3). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dana untuk program ini sebesar Rp564.570.000,00 dengan tiga kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi sebesar Rp286.380.000,00 yang digunakan untuk identifikasi calon lokasi transmigrasi, pengurusan SK pencadangan areal, pengurusan dan penerbitan SK-HPL, pengurusan penerbitan sertifikat hak milik, rapat teknis dan konsultasi pertanahan dan penataan pertanahan.
- b) Kegiatan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp54.270.000,00 yang digunakan untuk penyuluhan dan penyebaran informasi.

c) Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2K Trans sebesar Rp223.920.000,00.

Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 495.750.000,00 atau 87,81 %.

4). Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp1.641.420.000,00 dengan 4 kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi sebesar Rp293.900.000,00 berupa pengembangan lahan usaha produktif dan peningkatan teknis kapasitas SDM wirausaha.

b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebesar Rp934.120.000,00 berupa pengadaan bantuan kebutuhan dasar dan pengendalian distribusi pangan beras dan non beras.

c) Kegiatan Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi sebesar Rp17.600.000,00.

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2Mkt sebesar Rp395.800.000,00.

Realisasi anggaran sebesar Rp1.263.806.400,00 atau 76,99%.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012 sebesar Rp 6.490.154.000,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.404.669.050,00 atau 67,86%.

3. Permasalahan dan Solusi

Hampir seluruh Instansi mempunyai program pro rakyat (untuk kesejahteraan masyarakat), terutama belanja Bantuan Sosial dengan sasaran dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya sinergitas program dan anggaran baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antar Dinas terkait tingkat Provinsi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Secara umum pelaksanaan program-program di atas tidak ada permasalahan.

B. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk tiga program yaitu:

1). Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk

Pagu anggaran untuk mendanai program ini sebesar Rp2.438.687.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.408.970.000,00 atau 98,78% untuk tiga kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Buah berkelanjutan dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- luas areal kawasan buah yang berhasil dikembangkan seluas 59 Ha pada 8 Kabupaten/Kota.
- Kelompok tani yang telah mengikuti sekolah lapang GAP tanaman buah-buahan sebanyak 8 kelompok tani pada 8 Kabupaten/Kota.
- Lembaga tanaman buah yang berhasil diberdayakan sebanyak 8 lembaga pada 8 Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Sayuran dan Biofarmaka berkelanjutan, dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Areal kawasan tanaman sayuran dan Biofarmaka yang berhasil dikembangkan seluas 180 Ha pada 8 Kabupaten/Kota.
- Kelompok tani yang telah mengikuti sekolah lapang GAP tanaman sayuran dan Biofarmaka sebanyak 4 kelompok pada 4 Kabupaten/Kota.
- Lembaga tanaman sayuran dan Biofarmaka yang diberdayakan sebanyak 10 lembaga pada 10 Kabupaten/Kota.
- Kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang GHP tanaman sayuran dan Biofarmaka sebanyak 1 kelompok pada 1 Kabupaten.

c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Ditjen Hortikultura, dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Pengelolaan laporan pelaksanaan pengembangan hortikultura sebanyak 14 laporan .
- Proses administrasi pengembangan selama 12 bulan.

2). Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian.

Pagu anggaran untuk mendanai program ini sebesar Rp2.200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.155.906.000,00 atau 98% untuk kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Pertanian dengan hasil yang telah dicapai yaitu:

- Kelompok tani yang mendapat bantuan alat pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 5 kelompok pada 5 Kabupaten/Kota.
- Kelompok tani yang mendapat bantuan alat pengolahan hasil tanaman hortikultura sebanyak 1 kelompok pada 1 Kabupaten.
- Pelayanan yang diberikan untuk proses administrasi pengolahan hasil pertanian selama 12 bulan.

3). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pagu anggaran untuk mendanai program ini sebesar Rp42.882.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.578.732.000,00 atau 94,63% untuk 4 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

- Pengembangan sumber air sebanyak 63 paket pada 11 Kabupaten/Kota.
- Konservasi air dan antisipasi anomali iklim sebanyak 12 paket pada 11 Kabupaten/Kota.
- Lembaga yang diberdayakan sebanyak 8 lembaga pada 8 Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

- Cetak sawah, perluasan areal lahan kering dan perluasan areal hortikultura seluas 60 Ha pada 11 Kabupaten/Kota.
- Areal Pengembangan Optimasi Lahan seluas 2.500 Ha pada 11 Kabupaten/Kota.
- Areal Pengembangan SRI seluas 700 Ha pada 11 Kabupaten/Kota.
- Sertifikasi untuk lahan pertanian sebanyak 2.600 persil pada 11 Kabupaten/Kota.
- Jalan pertanian yang diperbaiki sepanjang 4 Km pada 11 Kabupaten/Kota
- Areal perluasan lahan pertanian seluas 2.400 Ha pada 11 Kabupaten/Kota.

c. Laporan Penyaluran Pupuk bersubsidi sebanyak 1 laporan

d. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

dengan hasil fasilitasi pembiayaan pertanian.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2012 sebesar Rp. 47.521.387.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.143.608.000,00 atau 95%.

C. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk tiga program yaitu:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan dengan dana sebesar Rp4.210.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.062.100.000,00 atau 96,49% yang dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk:
 - a. Kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung perkebunan berupa pengembangan embung/dam parit di Kabupaten Tebo, Merangin dan Tanjung Jabung Barat.
 - b. Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur serta perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.

- c. Pengembangan optimasi lahan di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin.
 - d. Sertifikasi lahan pertanian untuk mendukung perkebunan di Kabupaten Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo, Bungo dan Batanghari.
 - e. Perluasan areal hortikultura/perkebunan di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjab Timur, Tebo, Bungo dan Merangin.
 - f. Fasilitasi pupuk dan pestisida yaitu pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Merangin.
- 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian dengan dana sebesar Rp3.550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.472.763.000,00 atau 97,82% dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk pengembangan pengolahan hasil pertanian.
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan dengan dana sebesar Rp8.453.618.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.096.386.000,00 atau 95,77% dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk kegiatan:
- a. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar berupa pemeliharaan kebun entres tanaman kopi di Kabupaten Kerinci.
 - b. Dukungan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar berupa:

- Pengawasan perluasan tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Kerinci.
 - Pengawasan perluasan tanaman Kopi Robusta di Kota Sungai Penuh.
- c. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim berupa:
- Integrasi tanaman tebu-ternak di Kabupaten Kerinci.
 - Pembinaan, pengembangan agribisnis lembaga mandiri perkebunan.
- d. Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan berupa:
- Pengembangan dan pengawasan model-model peningkatan produksi kelapa sawit.
 - Penggantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu bersertifikat.
 - Pelatihan fasilitator daerah (Fasda) tanaman tahunan.
 - Rekonsiliasi lahan tanaman tahunan, pengawasan kebutuhan sarana dan prasarana tanaman tahunan, integrasi tanaman tahunan-ternak di Kabupaten Muaro Jambi, pengawasan kegiatan integrasi tanaman tahunan-ternak di Provinsi dan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perkebunan tanaman kelapa.
 - Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet) di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

e. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan berupa:

- Penanganan pascapanen tanaman perkebunan dan tanaman semusim dalam bentuk bantuan peralatan pascapanen tanaman tebu di Kabupaten Kerinci.
- Penanganan pascapanen tanaman tahunan dalam bentuk bantuan peralatan pascapanen tanaman kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan dengan mengevaluasi tenaga penilaian usaha perkebunan tahun 2009 (9 Kabupaten) dan sosialisasi legalitas, peraturan perizinan usaha perkebunan (9 Kabupaten).

f. Penerapan standar perkebunan rakyat dengan mengadakan sosialisasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO).

g. Penanganan gangguan usaha dan konflik dengan memfasilitasi, inventarisasi dan identifikasi serta penanganan gangguan usaha perkebunan pada 9 Kabupaten, pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan penilaian PIR-TRANS/KKPA pada 4 Kabupaten, dan pemantauan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian masalah PIRBUN pada 5 Kabupaten.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Perkebunan Provinsi Jambi TA.

2012 sebesar Rp. 16.213.618.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.631.249.000,00 atau 96,41%.

**D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Jambi**

**1. Program dan Kegiatan yang diterima dan
Pelaksanaannya**

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk Program:

- 1) Pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal dengan dana sebesar Rp22.379.980.000,00, realisasi Rp19.996.512.000,00 atau 79,91% dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk:
 - Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.
 - Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.
 - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
 - Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
- 2) Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian dengan dana sebesar Rp4.050.000.000,00, realisasi

Rp4.050.000.000,00 atau 100% dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan pemasaran domestik dan pengembangan hasil pertanian.

- 3) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan dana sebesar Rp500.000.000,00, realisasi Rp500.000.000,00 atau 100% dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian dan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi TA. 2012 sebesar Rp. 26.929.980.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.361.022.000,00 atau 90,46%.

E. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi dilaksanakan untuk program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum berupa pembangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Perkebunan Provinsi Jambi TA.

2012 sebesar Rp. 16.213.618.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.631.249.000,00 atau 96,41%.

F. Dinas PU

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas PU Provinsi Jambi dilaksanakan untuk dua Program yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan jalan dengan dana sebesar Rp65.143.552.000,00, realisasi sebesar Rp63.716.908.000,00 atau 97,81% dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk kegiatan preservasi dan peningkatan jalan Nasional yaitu berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 63,31 km, pemeliharaan rutin kembatan 288,20 m, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan 24,71 km, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan dana sebesar Rp3.683.640.000,00, realisasi sebesar Rp3.683.640.000,00 atau 100% dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yaitu berupa jaringan irigasi yang berhasil dioperasikan dan dipelihara seluas 8.128 Ha, jaringan reklamasi rawa yang berhasil dioperasikan dan dipelihara seluas 11.103 Ha.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi TA. 2012 sebesar Rp. 68.827.192.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp67.400.548.000,00 atau 97,93%.

G. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilaksanakan untuk program :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan dana sebesar Rp1.500.000.000,00, realisasi sebesar Rp1.477.978.000,00 atau 98,53% dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan.
- 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan dua kegiatan yaitu :
 - Pengembangan sistem pembenihan ikan dengan alokasi dana sebesar Rp1.148.010.000,00, realisasi Rp1.058.188.000,00 atau 92,18%.
 - Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan dengan alokasi dana sebesar Rp1.323.985.000,00, realisasi RP1.167.938.000,00 atau 88,21%.
- 3) Peningkatan daya saing produk perikanan dengan tiga kegiatan yaitu:

- Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan dengan alokasi dana Rp750.000.000,00, realisasi 729.885.000,00 atau 97,32%.
- Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dengan alokasi dana Rp300.000.000,00, realisasi Rp300.000.000,00 atau 100%.
- Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi dengan alokasi dana Rp1.850.000.000,00, realisasi Rp1.029.338.000,00 atau 54,22%.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi TA. 2012 sebesar Rp. 6.871.995.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.763.327.000,00 atau 83,87%.

3. Permasalahan dan Solusi

- a. Masalah:** Pengurusan surat-surat kapal khususnya Gross Akte memerlukan waktu yang lama sehingga kapal tidak dapat langsung beroperasi/melaut.

Solusi: Penyusunan surat kapal disederhanakan dengan biaya yang terjangkau.

- b. Masalah:** Masih sedikitnya penyedia barang dan jasa yang mengerti tentang induk ikan.

Solusi: Perlu pendampingan dalam penyediaan barang dan jasa oleh pelaksana di lapangan.

- c. Masalah:**

- Lambatnya penetapan PPK pada Satker yang bersangkutan karena tidak memenuhi syarat.
- Penetapan lokasi bangunan tidak tepat.
- Proses lelang baru dilaksanakan pada bulan Oktober.

Solusi:

- Penetapan PPK dari satker lainnya.
- Pengambilan alih Provinsi dalam keputusan lokasi bangunan .
- Penganggaran di tahun 2014 (lanjutan)

H. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dilaksanakan untuk monitoring Pembangunan Fisik .

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi TA. 2012 pada awalnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kemudian direvisi menjadi Rp28.490.000,00 yang dialokasikan untuk dana Monitoring Pembangunan Fisik sedangkan sisanya Rp971.510.000,00 dialihkan ke Kabupaten Merangin. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar 0 %.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dana Monitoring Pembangunan fisik tidak terlaksana dikarenakan:

- 1) Sebagian besar dana Tugas Pembangunan diperuntukan bagi kegiatan fisik, maka keterlambatan yang disebabkan oleh adanya revisi anggaran, keterlambatan juklak/juknis atau DIPA baru terbit pada perubahan anggaran akan sangat mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
- 2) Keterlambatan Penerbitan SK penanggungjawab kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. Solusi

Perlu percepatan penyampaian petunjuk teknis dan penerbitan SK penanggung jawab kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I. RSUD Raden Mattaher

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Penggunaan dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN Tahun 2012 oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dilaksanakan untuk program bina upaya kesehatan yang pelaksanaannya untuk kegiatan pembangunan gedung dan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB.

Adapun pembangunan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pembangunan gedung operasi
- b. Pembangunan gedung ICU

c. Pembangunan gedung perawatan kelas III

Sedangkan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB antara lain:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Mesin Anestesi (2 unit) | f. ECG (3 unit) |
| b. Lampu operasi (2 unit) | g. Bed Side Monitor (5 unit) |
| c. EMG (1unit) | h. Ventilator (5 unit) |
| d. Laparoscopy (1 unit) | i. ICCU Bed (24 Unit) |
| e. USG (1 unit) | j. Tempat tidur kelas III
(240 unit) |

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012, dimana untuk pembangunan gedung dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 s/d 30 Desember 2012 dan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada tanggal 08 November 2012 s/d 27 Desember 2012.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran dana TP yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2012 sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.400.035.250,00 atau 94%.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan dana TP TA. 2012 di RSUD Raden Mattaher Jambi khususnya dalam kegiatan pembangunan gedung operasi, ICU dan gedung perawatan kelas III sedikit mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan Juklak dan Juknis yang terlambat diterima. Agar tahun berikutnya tidak terjadi permasalahan yang sama maka pihak RSUD memberikan masukan kepada

Pusat, agar dilakukan percepatan terhadap penyampaian
Juklak/Juknis.

5.2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pemberian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setelah itu diberikan kepada Kabupaten/Kota melalui sumber dana dari:

1. Direktorat Jenderal Perikanan tangkap berupa:
 - Kapal Inkamina 311 kepada KUB Gulama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berupa bantuan calon induk ikan untuk BBI dan UPR:
 - 1) Calon induk Nila 5 paket, Lele 34 paket dan Patin 205 kg di Kota Jambi.
 - 2) Calon induk Nila 5 paket, dan Patin 210 kg di Kabupaten Batanghari.
 - 3) Calon induk Nila 5 paket di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 4) Calon induk Nila 5 paket di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - 5) Calon induk Nila 5 paket, Lele 40 paket di Kabupaten Tebo.
 - 6) Calon induk Nila 5 paket, Mas 75 Paket di Kabupaten Bungo.
 - 7) Calon induk Nila 5 paket, Mas 75 Paket di Kabupaten Merangin.
 - 8) Calon induk Nila 5 paket, Mas 75 Paket, Lele 12 paket di Kabupaten Sarolangun.
 - 9) Calon induk Nila 5 paket, Mas 75 Paket di Kabupaten Kerinci.
 - 10) Calon induk Nila 6 paket, Mas 75 Paket di BBI Sentral Kerinci.
 - 11) Calon induk Nila 2 paket, Lele 2 Paket di UPTD BBID Provinsi.

5.3. DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

5.3.1. Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp275.918.956.000,00 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp22.207.999.000,00 Kementerian Pertanian sebesar Rp55.268.736.000,00 Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.855.871.000,00, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.384.879.000,00, Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp114.644.898.000,00, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.178.569.000,00, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp12.744.977.000,00, Kementerian Sosial sebesar Rp 13.176.171.000,00, Kementerian Kehutanan sebesar Rp4.701.710.000,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.770.893.000,00, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp5.618.299.000,00, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.150.000.000,00, Kementerian Lingkungan Hidup Rp3.801.388.000,00, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.513.594.000,00, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp2.387.858.000,00, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp500.000.000,00, Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp134.417.000,00, Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.089.686.000,00, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp372.914.000,00 dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.416.097.000,00 secara keseluruhan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi TA. 2012 yang dikelola SKPD/ SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp276.648.746,00 atau 91,04%.

Tabel 5.2. Dana Dekonsentrasi Yang Dikelola SKPD Provinsi
Jambi TA. 2012

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana Dekonsentrasi	Total Dana (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)
1	Badan Penanaman Modal Daerah	Kemendagri	500.000	460.483,60	92,1
2	Badan Diklat Provinsi	Kemendagri	204.800	202.017,90	98,64
3	Badan Pemberdayaan Masy Perempuan	Kemendagri	15.981.139	14.838.534,80	92,85
4	Bappeda Provinsi	Kemendagri	1.381.350	854.434,80	76,27
5	Sekretariat Daerah	Kemendagri	4.029.210	3.301.728,60	86,64
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Kementan	18.807.622	18.160.727,80	96,56
7	Balai Proteksi TPH	Kementan	3.322.325	3.208.367	96,57
8	Badan Ketahanan Pangan Provinsi	Kementan	9.125.700	4.334.448,20	47,5
9	Dinas Perkebunan	Kementan	3.852.405	3.455.108,60	89,69
10	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Kementan	6.761.462	5.520.191,30	81,64
11	Sekretariat Bakorluh	Kementan	13.309.222	11.979.826,60	90,01
12	Disperindag	Kementerian Perindustrian	2.855.871	2.757.712,60	96,56
13	Dinas ESDM	Kemen ESDM	1.384.879	1.375.582,20	99,33
14	Dinas Pendidikan	Kemendiknas	114.644.898	106.931.892,40	93,27
15	Dinas Kesehatan	Kemenkes	15.178.569	14.122.965,40	93,05
16	Dinas Sosnakertrans	Kemensos	12.744.977	12.558.771,50	98,54
17	Dinas Sosial	Kemensos	13.176.171	12.322.803,30	93,52
18	Dinas Kehutanan	Kemenhut	4.701.710	3.627.241,90	77,15
19	Dinas Kelautan & Perikanan	Kementerian Kelautan & Perikanan	8.770.893	7.879.873	89,84
20	Dinas PU	Kemen PU	5.618.299	5.061.129,60	90,08
21	Disbudpar	Kemenbudpar	1.150.000	1.081.139,50	94,01
22	BLHD	Kemen LH	3.801.388	3.144.025,60	82,71
23	Din Kop dan UMKM	Kemenneg Kop & UKM	4.513.594	4.385.146	97,15
24	Bappeda	Kementerian Bappenas	931.290	761.650,30	81,78
25	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	Perpustakaan Nasional RI	2.522.275	2.435.840,70	96,1
26	Bapemroda	BKPM	500.000	482.717,30	96,54
27	Disperindag	Kementerian Perdagangan	2.089.686	2.013.232,20	96,34
28	Dinas PU	Kementerian Perumahan Rakyat	372.914	372.655	99,93
29	Dispora	Kemenneg Pemuda & Olahraga	4.416.097	4.338.871,50	98,25
J u m l a h			275.918.956	251.207.468,10	91,04

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2013 (data diolah)

5.3.2. Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Dekonsentrasi terdiri dari 24 SKPD yaitu; Badan Penanaman Modal Daerah, Badan Diklat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Balai Proteksi TPH, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Bakorluh, Disperindag, Dinas ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans, Dinas

Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Disbudpar, BLHD, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dispora.

5.3.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masing-masing Kementerian/SKPD mengirimkan laporan ke Bappeda Provinsi dalam format laporan tersendiri dan tidak/belum mengacu pada Format C PP Nomor 39 Tahun 2006.
2. Penerapan aplikasi Format C PP Nomor 39 Tahun 2006 belum optimal karena SKPD masih mengacu pada format per Kementerian masing-masing. Persentase dari target kegiatan masih belum jelas, apakah target diperoleh dari total pagu anggaran per tahun atau dari total pagu per triwulan berjalan. Jika target diperoleh dari total pagu anggaran maka persentase target menjadi kecil, dan jika target diperoleh dari total pagu per triwulan maka persentase target akan menjadi besar.

b. Solusi

- Menegaskan kembali kepada masing-masing Kementerian agar laporan mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2006